



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR *39* TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa penetapan nilai perolehan air tanah yang ditetapkan Daerah Provinsi sebagai dasar perhitungan pajak air tanah.
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penetapan nilai perolehan air tanah merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah.

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang air tanah
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang air tanah.
6. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
7. Air Baku merupakan air yang berasal dari air tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
8. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai Pajak Air Tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air.
9. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga air tanah yang akan dikenai Pajak Pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air.
10. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah Biaya Investasi dalam rupiah untuk mendapatkan air baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
11. Biaya Investasi adalah biaya pembuatan sumur produksi ditambah biaya operasional selama umur produksi dalam rupiah.
12. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
13. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subjek kelompok pengguna air tanah serta volume pengambilannya.

14. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah air tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk menetapkan Nilai Perolehan Air Tanah sebagai dasar pengenaan pajak air tanah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai upaya melakukan pengendalian dalam pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk menjaga ketersediaan air tanah dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB II

FAKTOR NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 3

- (1) Besaran NPA dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen berikut:
 - a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (3) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air tanah; dan
 - c. kualitas air tanah.
- (4) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi faktor-faktor berikut:
 - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
 - b. volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan

- c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 4

- (1) Faktor jenis sumber air dan lokasi sumber air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b ditentukan oleh kriteria meliputi:
 - a. ada sumber air alternatif; atau
 - b. tidak ada sumber air alternatif.
- (2) Faktor kualitas air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c ditentukan oleh kriteria berikut:
 - a. kualitas air tanah baik; atau
 - b. kualitas air tanah tidak baik

Pasal 5

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna air tanah yang ditetapkan dalam bentuk perusahaan berikut:
 - a. Kelompok 1, merupakan bentuk perusahaan produk berupa air, meliputi:
 - 1. pemasok air baku;
 - 2. perusahaan air minum;
 - 3. industri air minum dalam kemasan;
 - 4. pabrik es kristal; dan
 - 5. pabrik minuman olahan.
 - b. Kelompok 2, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah besar, meliputi:
 - 1. industri tekstil;
 - 2. pabrik makanan olahan;
 - 3. hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
 - 4. pabrik kimia; dan
 - 5. industri farmasi.
 - c. Kelompok 3, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah sedang, meliputi:
 - 1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
 - 2. usaha persewaan jasa kantor;
 - 3. apartemen;
 - 4. pabrik es skala kecil;
 - 5. agro industri; dan
 - 6. industri pengolahan logam.

- d. Kelompok 4, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah kecil, meliputi:
 - 1. losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
 - 2. tempat hiburan;
 - 3. restoran;
 - 4. gudang pendingin;
 - 5. pabrik mesin elektronik; dan
 - 6. pencucian kendaraan bermotor; dan
 - e. Kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
 - 1. usaha kecil skala rumah tangga;
 - 2. hotel non-bintang;
 - 3. rumah makan; dan
 - 4. rumah sakit.
- (2) Kelompok pengguna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan air tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau baku utama.
- (3) Kelompok pengguna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan memperhatikan persentase penggunaan air tanah pada hasil industrinya.

BAB III KOMPONEN PENENTUAN NPA

Pasal 6

- (1) Komponen sumber daya alam dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya.
- (3) Ketentuan kriteria komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) memiliki nilai berdasarkan kelompok volume pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif dengan tabel.
- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.

- (3) Tabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV PENGHITUNGAN NPA

Pasal 8

- (1) Unsur penghitungan NPA terdiri dari Volume Pengambilan dan HDA.
- (2) Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:
$$\text{NPA} = (\text{Volume Pengambilan}) \times \text{HDA}$$

Pasal 9

- (1) Unsur penghitungan HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri dari HAB dan FNA.
- (2) Penghitungan HAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:
$$\text{HDA} = \text{HAB} \times \text{FNA}$$

Pasal 10

- (1) Unsur penghitungan HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri dari Biaya Investasi dibagi dengan Volume Pengambilan selama umur produksi.
- (2) HAB untuk daerah ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11





- (1) Setiap komponen FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mempunyai bobot masing-masing yang besarnya ditentukan berikut:
 - a. Sumber daya alam (S) sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan (P) sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Penghitungan FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:
$$\text{FNA} = 60\% \text{ S} + 40\% \text{ P}$$

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

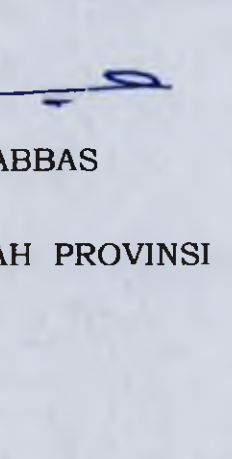
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

| PARAF KOORDINASI | | | |
|------------------|--|-------------------------|---|
| No. | Nama | Jabatan | Paraf |
| 1 | DR. HJ. NUR ENDANG ABBAS, SE. M. SI | SEKDA |  |
| 2 | Drs. SUHARNO, M. TP | ASSISTEN II |  |
| 3 | Ir. H. BAHARU, M. SI | PLT KAPIS DINAS ESDM |  |
| 4 | | | |
| 5 | H. KAMARI, SH | KARO HUKUM |  |

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal 23-10-2020

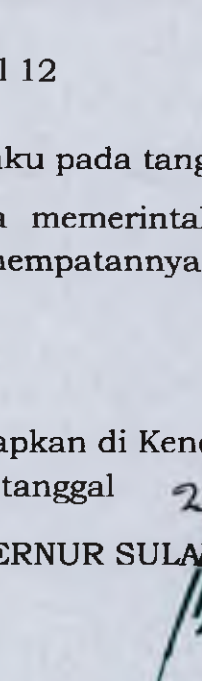
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


ALI MAZI

Diundangkan di Kendari

Pada tanggal 23-10-2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA


NUR ENDANG ABBAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2020
NOMOR 39

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 39
TENTANG :

| VOLUME PENGAMBILAN KELOMPOK PENGGUNA | HARGA AIR BAKU (HAB) (Rp) | KOMPONEN SDA (S) | | KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN (P) | | | | | FAKTOR NILAI AIR (FNA) (S x 60%) + (P x 40%) | | | | | HARGA DASAR AIR (HDA) (Rp) | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|-------|---|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|---|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | PERING KAT | BOBOT | 0 - 50 m ³ | 51 - 500 m ³ | 501 - 1000 m ³ | 1001 - 2500 m ³ | >2500 m ³ | 0 - 50 m ³ | 51 - 500 m ³ | 501 - 1000 m ³ | 1001 - 2500 m ³ | >2500 m ³ | 0 - 50 m ³ | 51 - 500 m ³ | 501 - 1000 m ³ | 1001 - 2500 m ³ | >2500 m ³ |
| Kelompok 1 | 2200 | 4 | 16 | 9 | 13.5 | 20.25 | 30.38 | 45.56 | 13.2 | 15 | 17.7 | 21.752 | 27.824 | 29,040 | 33,000 | 38,940 | 47,854 | 61,213 |
| a. Pemasok Air Baku | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. Perusahaan Air Minum | 2200 | 3 | 9 | 9 | 13.5 | 20.25 | 30.38 | 45.56 | 9 | 10.8 | 13.5 | 17.552 | 23.624 | 19,800 | 23,760 | 29,700 | 38,614 | 51,973 |
| c. Industri Air Minum dalam Kemasan | 2200 | 2 | 4 | 9 | 13.5 | 20.25 | 30.38 | 45.56 | 6 | 7.8 | 10.5 | 14.552 | 20.624 | 13,200 | 17,160 | 23,100 | 32,014 | 45,373 |
| d. Pabrik Es Kristal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| e. Pabrik Minuman Olahan | 2200 | 1 | 1 | 9 | 13.5 | 20.25 | 30.38 | 45.56 | 4.2 | 6 | 8.7 | 12.752 | 18.824 | 9,240 | 13,200 | 19,140 | 28,054 | 41,413 |
| Kelompok 2 | 2100 | 4 | 16 | 7 | 10.5 | 15.75 | 23.63 | 35.44 | 12.4 | 13.8 | 15.9 | 19.052 | 23.776 | 26,040 | 28,980 | 33,390 | 40,009 | 49,930 |
| a. Industri Tekstil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. Pabrik Makanan Olahan | 2100 | 3 | 9 | 7 | 10.5 | 15.75 | 23.63 | 35.44 | 8.2 | 9.6 | 11.7 | 14.852 | 19.576 | 17,220 | 20,160 | 24,570 | 31,189 | 41,110 |
| c. Hotel bintang 3, Bintang 4, Bintang 5 | 2100 | 2 | 4 | 7 | 10.5 | 15.75 | 23.63 | 35.44 | 5.2 | 6.6 | 8.7 | 11.852 | 16.576 | 10,920 | 13,860 | 18,270 | 24,889 | 34,810 |
| d. Pabrik Kimia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| e. Industri Farmasi | 2100 | 1 | 1 | 7 | 10.5 | 15.75 | 23.63 | 35.44 | 3.4 | 4.8 | 6.9 | 10.052 | 14.776 | 7,140 | 10,080 | 14,490 | 21,109 | 31,030 |
| Kelompok 3 | 2000 | 4 | 16 | 5 | 7.5 | 11.25 | 16.88 | 25.31 | 11.6 | 12.6 | 14.1 | 16.352 | 19.724 | 23,200 | 25,200 | 28,200 | 32,704 | 39,448 |
| a. Hotel Bintang 1, Bintang 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. Usaha Persewaan Jasa Kantor | 2000 | 3 | 9 | 5 | 7.5 | 11.25 | 16.88 | 25.31 | 7.4 | 8.4 | 9.9 | 12.152 | 15.524 | 14,800 | 16,800 | 19,800 | 24,304 | 31,048 |
| c. Apartemen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d. Pabrik Es Skala Kecil | 2000 | 2 | 4 | 5 | 7.5 | 11.25 | 16.88 | 25.31 | 4.4 | 5.4 | 6.9 | 9.152 | 12.524 | 8,800 | 10,800 | 13,800 | 18,304 | 25,048 |
| e. Agro Industri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| f. Industri Pengolahan Logam | 2000 | 1 | 1 | 5 | 7.5 | 11.25 | 16.88 | 25.31 | 2.6 | 3.6 | 5.1 | 7.352 | 10.724 | 5,200 | 7,200 | 10,200 | 14,704 | 21,448 |
| Kelompok 4 | 1900 | 4 | 16 | 3 | 4.5 | 6.75 | 10.13 | 15.19 | 10.8 | 11.4 | 12.3 | 13.652 | 15.676 | 20,520 | 21,660 | 23,370 | 25,939 | 29,784 |
| a. Losmen/Pondokan/Penginapan/Rumah Sewa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. Tempat Hiburan | 1900 | 3 | 9 | 3 | 4.5 | 6.75 | 10.13 | 15.19 | 6.6 | 7.2 | 8.1 | 9.452 | 11.476 | 12,540 | 13,680 | 15,390 | 17,959 | 21,804 |
| c. Restoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d. Gudang Pendingin | 1900 | 2 | 4 | 3 | 4.5 | 6.75 | 10.13 | 15.19 | 3.6 | 4.2 | 5.1 | 6.452 | 8.476 | 6,840 | 7,980 | 9,690 | 12,259 | 16,104 |
| e. Pabrik Mesin Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| f. Pencucian Kendaraan Bermotor | 1900 | 1 | 1 | 3 | 4.5 | 6.75 | 10.13 | 15.19 | 1.8 | 2.4 | 3.3 | 4.652 | 6.676 | 3,420 | 4,560 | 6,270 | 8,839 | 12,684 |
| Kelompok 5 | 1800 | 4 | 16 | 1 | 1.5 | 2.25 | 3.38 | 5.06 | 10 | 10.2 | 10.5 | 10.952 | 11.624 | 18,000 | 18,360 | 18,900 | 19,714 | 20,923 |
| a. Usaha Kecil Skala Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. Hotel Non Bintang | 1800 | 3 | 9 | 1 | 1.5 | 2.25 | 3.38 | 5.06 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.752 | 7.424 | 10,440 | 10,800 | 11,340 | 12,154 | 13,363 |
| c. Rumah Makan | 1800 | 2 | 4 | 1 | 1.5 | 2.25 | 3.38 | 5.06 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.752 | 4.424 | 5,040 | 5,400 | 5,940 | 6,754 | 7,963 |
| d. Rumah Sakit | 1800 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.25 | 3.38 | 5.06 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.952 | 2.624 | 1,800 | 2,160 | 2,700 | 3,514 | 4,723 |

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**NOMOR : 39****TENTANG :****PERINGKAT DAN BOBOT KOMPONEN SUMBER DAYA ALAM SERTA NILAI KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN AIR TANAH**

1. Peringkat dan Bobot Kriteria Komponen Sumber Daya Alam

| No | Kriteria | Peringkat | Bobot |
|----|--|-----------|-------|
| 1 | Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air alternatif | 4 | 16 |
| 2 | Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif | 3 | 9 |
| 3 | Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif | 2 | 4 |
| 4 | Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif | 1 | 1 |

2. Nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan Air Tanah





| NO | Volume Pengambilan Peruntukan | 0 - 50 M ³ | 51 - 500 M ³ | 501 - 1000 M ³ | 1001 - 2500 M ³ | >2500 M ³ |
|----|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | | | | |
| 1 | Kelompok 5 | 1 | 1.5 | 2.25 | 3.38 | 5.06 |
| 2 | Kelompok 4 | 3 | 4.5 | 6.75 | 10.13 | 15.19 |
| 3 | Kelompok 3 | 5 | 7.5 | 11.25 | 16.88 | 25.31 |
| 4 | Kelompok 2 | 7 | 10.5 | 15.75 | 23.63 | 35.44 |
| 5 | Kelompok 1 | 9 | 13.5 | 20.25 | 30.38 | 45.56 |

| PARAF KOORDINASI | | | |
|------------------|--|-------------------------|-------|
| No. | Nama | Jabatan | Paraf |
| 1 | DR. HJ. NUR BUNDANG S.BISAS, SE. M.Si | SEKDA | |
| 2 | Drs. SUHARNO. M. TP | ASSISTEN TI | |
| 3 | W. H. BAHARU. M. SI | PLT KADIS DINAS ESDM | |
| 4 | | | |
| 5 | H. KAMARI, SH | KARO HUKUM | |

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ALI MAZI

| VOLUME PENGAMBILAN | 0 - 50m ³ (Rp) | 51 - 500 m ³ (Rp) | 501 - 1000 m ³ (Rp) | 1001 - 2500 m ³ (Rp) | >2500 m ³ (Rp) |
|--|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| KELOMPOK PENGGUNA | | | | | |
| Kelompok 1 | 29,040 - 1,452,000 | 1,481,040 - 16,500,000 | 19,508,940 - 38,940,000 | 47,902,254 - 119,636,000 | 153,032,000 |
| a. Pemasok Air Baku | 19,800 - 990,000 | 1,009,800 - 11,880,000 | 14,879,700 - 29,700,000 | 38,653,014 - 96,536,000 | 129,932,000 |
| b. Perusahaan Air Minum | 13,200 - 660,000 | 673,200 - 8,580,000 | 11,573,100 - 23,100,000 | 32,046,414 - 80,036,000 | 113,432,000 |
| c. Industri Air Minum dalam Kemasan | 9,240 - 462,000 | 471,240 - 6,600,000 | 9,589,140 - 19,140,000 | 28,082,454 - 70,136,000 | 103,532,000 |
| d. Pabrik Es Kristal | | | | | |
| e. Pabrik Minuman Olahan | | | | | |
| Kelompok 2 | 26,040 - 1,302,000 | 1,328,040 - 14,490,000 | 16,728,390 - 33,390,000 | 40,049,209 - 100,023,000 | 124,824,000 |
| a. Industri Tekstil | 17,220 - 861,000 | 878,220 - 10,080,000 | 12,309,570 - 24,570,000 | 31,220,389 - 77,973,000 | 102,774,000 |
| b. Pabrik Makanan Olahan | 10,920 - 546,000 | 556,920 - 6,930,000 | 9,153,270 - 18,270,000 | 24,914,089 - 62,223,000 | 87,024,000 |
| c. Hotel Bintang 3, Bintang 4, Bintang 5 | 7,140 - 357,000 | 364,140 - 5,040,000 | 7,259,490 - 14,490,000 | 21,130,309 - 52,773,000 | 77,574,000 |
| d. Pabrik Kimia | | | | | |
| e. Industri Farmasi | | | | | |
| Kelompok 3 | 23,200 - 1,160,000 | 1,183,200 - 12,600,000 | 14,128,200 - 28,200,000 | 32,736,704 - 81,760,000 | 98,620,000 |
| a. Hotel Bintang 1, Bintang 2 | 14,800 - 740,000 | 754,800 - 8,400,000 | 9,919,800 - 19,800,000 | 24,328,304 - 60,760,000 | 77,620,000 |
| b. Usaha Persewaan Jasa Kantor | 8,800 - 440,000 | 448,800 - 5,400,000 | 6,913,800 - 13,800,000 | 18,322,304 - 45,760,000 | 62,620,000 |
| c. Apartemen | 5,200 - 260,000 | 265,200 - 3,600,000 | 5,110,200 - 10,200,000 | 14,718,704 - 36,760,000 | 53,620,000 |
| d. Pabrik Es Skala Kecil | | | | | |
| e. Agro Industri | | | | | |
| f. Industri Pengolahan Logam | | | | | |
| Kelompok 4 | 20,520 - 1,026,000 | 1,046,520 - 10,830,000 | 11,708,370 - 23,370,000 | 25,964,739 - 64,847,000 | 74,461,000 |
| a. Losmen/Pondokan/Penginapan/Rumah Sewa | 12,540 - 627,000 | 639,540 - 6,840,000 | 7,710,390 - 15,390,000 | 17,976,759 - 44,897,000 | 54,511,000 |
| b. Tempat Hiburan | 6,840 - 342,000 | 348,840 - 3,990,000 | 4,854,690 - 9,690,000 | 12,271,059 - 30,647,000 | 40,261,000 |
| c. Restoran | 3,420 - 171,000 | 174,420 - 2,280,000 | 3,141,270 - 6,270,000 | 8,847,639 - 22,097,000 | 31,711,000 |
| d. Gudang Pendingin | | | | | |
| e. Pabrik Mesin Elektronik | | | | | |
| f. Pencucian Kendaraan Bermotor | | | | | |
| Kelompok 5 | 18,000 - 900,000 | 918,000 - 9,180,000 | 9,468,900 - 18,900,000 | 19,733,314 - 49,284,000 | 52,308,000 |
| a. Usaha Kecil Skala Rumah Tangga | 10,440 - 522,000 | 532,440 - 5,400,000 | 5,681,340 - 11,340,000 | 12,165,754 - 30,384,000 | 33,408,000 |
| b. Hotel Non Bintang | 5,040 - 252,000 | 257,040 - 2,700,000 | 2,975,940 - 5,940,000 | 6,760,354 - 16,884,000 | 19,908,000 |
| c. Rumah Makan | 1,800 - 90,000 | 91,800 - 1,080,000 | 1,352,700 - 2,700,000 | 3,517,114 - 8,784,000 | 11,808,000 |
| d. Rumah Sakit | | | | | |

| PARAF KOORDINASI | | | |
|------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|
| No. | Nama | Jabatan | Paraf |
| 1 | DR. HJ. NURENDANG ABBAS, SE. M. SI | SEKDA |  |
| 2 | Drs. SUHARNO, M. TP | ASSISTEN II |  |
| 3 | Ir. H. BAHARU, M. SI | PLT KADIS DINAS ESDM |  |
| 4 | | | |
| 5 | H. KAMARI, SH | KARO HUKUM |  |

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


ALI MAZI